

**ANALISIS PERBEDAAN KONTRIBUSI PAD TERHADAP BELANJA
DAERAH SERTA PERTUMBUHAN PAD SEBELUM DAN SESUDAH
OTONOMI DAERAH
(Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Indonesia)**

(Skripsi)

Oleh

ANISTIA HAQ



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRACT

ANALYSIS DIFFERENTIATION THE SHARE OF REGIONAL OWN REVENUE AND THE GROWTH OF REGIONAL OWN REVENUE BEFORE AND AFTER THE REGIONAL AUTONOMY (EMPIRICAL STUDY AT COUNTRY/CITY IN INDONESIA)

By

ANISTIA HAQ

This study aims to examine the differences of the share of regional own revenue and the growth of regional own revenue before and after the regional autonomy is being held at country/city in Indonesia.

The population used in this study is country/city of Indonesia for the period of 1998-2000 and 2012-2014. Samples were obtained are as much 78 countries/cities in Indonesia. The hypothesis tested in this study is using Paired Sample T-test for testing the differentiation the share of regional own revenue and the growth of regional own revenue before and after the regional autonomy.

The results found that the share of regional own revenue after the regional autonomy is significantly lower than before the regional autonomy. Meanwhile for the growth of regional own revenue after the regional autonomy is significantly higher than before the regional autonomy.

Keywords: The Share of Regional Own Revenue, The Growth of Regional Own Revenue, and Regional Autonomy.

ABSTRAK

ANALISIS PERBEDAAN KONTRIBUSI PAD TERHADAP BELANJA DAERAH SERTA PERTUMBUHAN PAD SEBELUM DAN SESUDAH OTONOMI DAERAH (STUDI EMPIRIS PADA KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA)

Oleh

ANISTIA HAQ

Penelitian ini bertujuan untuk mengamati apakah terdapat perbedaan kontribusi PAD terhadap belanja daerah serta pertumbuhan PAD sebelum dan sesudah diberlakukannya otonomi daerah pada kabupaten/kota di Indonesia.

Populasi yang digunakan di dalam penelitian ini merupakan Kabupaten/Kota yang terdapat di Indonesia untuk tahun 1998 – 2000 dan tahun 2012 – 2014.. Sampel yang diperoleh adalah sebanyak 78 kabupaten/kota di Indonesia. Hipotesis dalam penelitian ini diuji menggunakan *Paired Sample T-test* untuk menguji perbedaan kontribusi PAD terhadap belanja daerah serta pertumbuhan PAD sebelum dan sesudah otonomi daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap belanja daerah sesudah otonomi daerah secara signifikan lebih rendah dibandingkan dengan sebelum diberlakukannya otonomi daerah. Sedangkan untuk pertumbuhan PAD sesudah otonomi daerah secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum diberlakukannya otonomi daerah.

Kata Kunci: Kontribusi PAD, Pertumbuhan PAD, dan Otonomi Daerah.

**ANALISIS PERBEDAAN KONTRIBUSI PAD TERHADAP BELANJA
DAERAH SERTA PERTUMBUHAN PAD SEBELUM DAN SESUDAH
OTONOMI DAERAH
(Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Indonesia)**

Oleh

ANISTIA HAQ

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA EKONOMI

Pada

Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

Judul Skripsi : **ANALISIS PERBEDAAN KONTRIBUSI PAD
TERHADAP BELANJA DAERAH SERTA
PERTUMBUHAN PAD SEBELUM DAN SESUDAH
OTONOMI DAERAH
(Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Indonesia)**

Nama Mahasiswa : **Anistia Haq**

No. Pokok Mahasiswa : 1311031011

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis



Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si.
NIP 19750620 200012 2 001

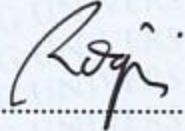
Ninuk Dewi K., S.E., M.Sc., CA., Akt.
NIP 19820220 200812 2 003

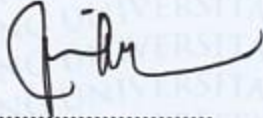
2. Ketua Jurusan Akuntansi

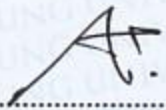
Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt.
NIP 19620612 199010 2 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si.** 

Sekretaris : **Ninuk Dewi K., S.E., M.Sc., CA., Akt.** 

Penguji Utama : **Kiagus Andi, S.E., M.Si., Akt., CA.** 

2. Dekan Fakultas Ekonomi



Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si.
NIP 19610904 198703 1 011

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **02 Juni 2017**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anistia Haq

NPM : 1311031011

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Perbedaan Kontribusi PAD terhadap Belanja Daerah serta Pertumbuhan PAD Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Indonesia)” telah ditulis secara sungguh-sungguh dan merupakan hasil karya sendiri, dan saya tidak melakukan plagiarisme atau pengutipan atas karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 11 Juni 2017



Anistia Haq
NPM. 1311031011

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Palembang, 4 Oktober 1996 sebagai putri pertama dari tiga bersaudara, buah hati dari pasangan Hujja Tulhaq, S.H., M.H. dan Oktaviani, S.E., Ak.

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-kanak di TK Al-Fallah pada tahun 2002. Kemudian pendidikan dasar di SD Al-Azhar 1 Bandar Lampung hingga tahun 2008. Lalu melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 2 Bandar Lampung sampai tahun 2010 dan sekolah menengah atas di SMA Negeri 2 Bandar Lampung sampai dengan tahun 2013.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung pada tahun 2013 melalui jalur SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri). Selama menjadi mahasiswi, penulis terdaftar sebagai anggota aktif Himakta (Himpunan Mahasiswa Akuntansi) FEB Unila, KSPM (Kelompok Studi Pasar Modal) FEB Unila, dan EBEC (*Economic and Business Entrepreneur Club*) FEB Unila. Selain itu, penulis juga pernah diamanahkan menjadi pengurus Himakta FEB Unila sebagai Sekretaris Bidang III periode 2015-2016.

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri.”

(Q.S. Ar-Ra’d:11)

“It ain’t over till it’s over.”

(Yogi Berra)

“I might bend, but I will never break.”

(Angela Merkel)

“Bukan tentang mengalahkan orang lain, tetapi dirimu sendiri.”

(A.O.)

“There will never be a word between yes and no; between now and never.”

(Anonymous)

PERSEMBAHAN

Teriring rasa syukur kepada Allah SWT yang membimbingku selama ini, karya ini kupersembahkan kepada:

- ☞ Kedua orang tuaku tersayang Ayahanda Hujja Tulhaq, S.H., M.H. dan Ibunda Oktaviani, S.E., Ak.
- ☞ Teman-teman seperjuangan terbaikku, S1 Akuntansi 2013.
- ☞ Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.

SANWACANA

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Perbedaan Kontribusi PAD terhadap Belanja Daerah serta Pertumbuhan PAD Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Indonesia)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan bantuan selama proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini. Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Yuztitya Asmaranti, S.E., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

4. Ibu Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Utama atas waktu, perhatian, serta nasihat yang telah diberikan dengan penuh kesabaran selama proses penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Ninuk Dewi Kesumaningrum, S.E., M.Sc., C.A., Akt. selaku Dosen Pembimbing Kedua atas waktu, bimbingan, saran, serta nasihat yang telah diberikan selama proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Kiagus Andi, S.E., M.Si., Akt. selaku Dosen Penguji Utama yang telah memberikan evaluasi, masukan serta saran yang membangun dalam proses penyempurnaan skripsi ini.
7. Bapak Yuliansyah, S.E., M.S.A., Ph.D., Akt., C.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, masukan, arahan dan nasihat sehingga penulis dapat menyelesaikan proses belajar.
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan, serta pembelajaran selama penulis menyelesaikan pendidikan di Universitas Lampung.
9. Seluruh karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih telah memberikan bantuan dan pelayanan terbaik selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Lampung.
10. Kedua orang tuaku; Ayah tersayang Hujja Tulhaq, S.H., M.H. dan Ibu tercinta Oktaviani, S.E., Ak. untuk segala bentuk *support*, pengorbanan, perjuangan, kasih sayang, sabar dan didik, serta panjatan doa-doa di setiap malamnya. Sehat-sehat terus ya kalian Yah, Bu.

11. Adik-adik kandungku; Muhammad Muzaki dan Nadiyah Ramadhani. Terima kasih untuk segala *support*-nya.
12. Keluarga keduaku; Bapak Busri, Ibu Yani, Mas Zikin, Akhyar dan untuk *MJ*; Kak Boim, Kak Sony, Mba Fika, Widya. Terima kasih *guys*, dua bulan tinggal bareng bubar sudah segala dosa dan aib seumur hidup.
13. Wadah-wadahku. '*A'E'I*'; Ayi, Cepe, Fatma, Ijah, Keke, Nina, Robi, Yuda. *HIMADUT*; Amel, Ari, Indah, Inun, Meily, Putri, Terry, Veiga dan juga Ade, Adit, Jobest, Jule, Kadek, Pau, Riki, Wahyu Wido, Yudi. *HUMBA-HUMBA*; Ayu, Fabio, Mesfi, Samie, AyuLut, *Incess* Ulli, Kak Gusti, Melati, Monic, Nadya.
14. Arum (receh), Elshinta, Rifka (receh), Serli, Azhar, Bobby, Egi, dll dan untuk angkatan terhebatku S1 Akuntansi 2013, terima kasih tahun-tahun kebersamaannya, bahagia dan sukses ya untuk kita semua.
15. S1 Akuntansi beda jam bangun; Armel, Eten, Eza, Indika, Uca, Tipeh. Semangat selalu kalian, tolong latihan bangun pagi dari sekarang.
16. *Dream Team*, Presidium Himakta 15/16 Kabinet PROAKTIF. Dimas Rijalul Fanny, Ely Oktaviana, Etania Anjani, Fabio Akbar, Fera Yunita, Filosofi Putri Aulia, Haryati, Nabila, Lano Bahagia, Nisrima Zainun, Randa Aryanata, Ruchi Ernanda, dan Yuda Pratama. Masa-masa terbaikku. Terima kasih *guys* buat semua GG (guyon dan gunjing) berbobotnya.
17. *SKUBAL*; Kak Ferly, Aliva, Arini, Eel, Tegar, Dhissa, Fani, Ica, Nasa, Rume. Lancar-lancar terus ya *Pun* arisan stabil kita, ditunggu *sosu*-nya!
18. Dari gowes hingga ke *start engine*, M. Tegar Yozeta dan Witri Indiriana. 10 tahun sampai selamanya ya *sis*.

19. *EVNFLO*; terima kasih kakak-kakakku segala ilmu dalam bermusiknya selama ini, *keep rockin' you guys!*
20. Yuninda Devi Arintika, *thanks cuy* berkat dirimu aku lulus pendadaran.
Semangat UASnya.
21. Pejuang LDR Anggie Octavia, untuk waktu, telinga, saran, masukan, dan obrolan-obrolan dewasa lainnya. Pembimbing bukan *lo* ini kak.
22. Sahabat terbaikku Siti Rohmatul Fajriah, untuk semua tabah lalu sabarmu, *handle*-mu, hutangmu, dan berisikmu. Sukses Ay untuk kita, jangan lupa bahagia.
23. *Support*-mu dalam diam sedari dulu, masa-masa kuliahku, Ardyatama.

Atas bantuan dan dukungannya, penulis mengucapkan terimakasih, semoga mendapat balasan dari Allah SWT. Demikianlah, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya.

Bandar Lampung, 11 Juni 2017
Penulis,

Anistia Haq

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
ABSTRACT	ii
ABSTRAK	iii
HALAMAN JUDUL	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
LEMBAR PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 Otonomi Daerah.....	8
2.1.2 Pendapatan Asli Daerah.....	10
2.1.3 Belanja Daerah.....	12
2.2 Penelitian Terdahulu	16

2.3	Model Penelitian	20
2.4	Pengembangan Hipotesis	21
2.4.1	Kontribusi PAD terhadap Belanja Daerah Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah	21
2.4.2	Pertumbuhan PAD Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah.....	22

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Populasi dan Sampel	24
3.2	Jenis dan Sumber Data	25
3.3	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	25
3.3.1	Kontribusi PAD terhadap Belanja Daerah.....	26
3.3.2	Pertumbuhan PAD	26
3.4	Metode Analisis Data	27
3.4.1	Statistik Deskriptif	27
3.4.2	Uji Normalitas	28
3.4.3	Uji Hipotesis	28

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1	Gambaran Objek Penelitian	30
4.2	Statistik Deskriptif.....	33
4.3	Uji Normalitas	35
4.4	Uji Hipotesis.....	36
4.5	Pembahasan	38
4.5.1	Kontribusi PAD terhadap Belanja Daerah.....	38
4.5.2	Pertumbuhan PAD	39

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1	Simpulan.....	42
5.2	Keterbatasan Penelitian	43
5.3	Saran.....	44

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
2.1 Penelitian Terdahulu	16
4.1 Pengambilan Sampel Penelitian Kabupaten/Kota di Indonesia.....	30
4.2 Daftar Sampel Kabupaten/Kota.....	31
4.3 Hasil Statistik Deskriptif.....	33
4.4 <i>Paired Sample T-test</i>	36
4.5 Hasil Perbedaan Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah	41

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
4.4 Grafik Histogram Hasil Uji Normalitas Kontribusi PAD terhadap Belanja Daerah Sebelum - Sesudah	35
4.5 Grafik Histogram Hasil Uji Normalitas Pertumbuhan PAD Sebelum - Sesudah	35

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Data PAD

Lampiran 2 : Data Belanja Daerah

Lampiran 3 : Data Kontribusi PAD terhadap Belanja Daerah

Lampiran 4 : Data Pertumbuhan PAD

Lampiran 5 : Data Rata-Rata Kontribusi PAD terhadap Belanja Daerah dan
Pertumbuhan PAD Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah

Lampiran 6 : Hasil Olah Data *SPSS 22 for Windows*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pengertian otonomi daerah sesuai dengan ketentuan umum mengenai Pemerintah Daerah yang diatur pada Undang-Undang No.22 Tahun 1999 dan kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004; ialah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan umum tersebut didukung dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 yang telah diperbaharui dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, mengenai Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua Undang-undang tersebut memberikan konsekuensi dalam arti kata kewajiban baru pada daerah tiap-tiap daerah bersangkutan agar dapat melakukan penataan di berbagai bidang, baik secara administratif maupun keuangan. Hal itulah yang diharapkan dapat menjadikan konsep desentralisasi yang sesungguhnya terwujud.

Otonomi daerah secara umum merupakan gambaran kondisi dimana kendali atau komando suatu daerah diserahkan kembali dari pemerintahan pusat kepada

pemerintah daerah sebagai wujud nyata dari penerapan desentralisasi. Dengan diterapkannya desentralisasi pemerintahan, maka diharapkan tiap-tiap daerah dapat berjalan mandiri dengan meminimalisasi campur tangan pemerintah pusat. Timbulnya kemandirian akan tercipta pada masing-masing daerah dengan adanya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antara sesama pemerintah daerah di dalamnya yang tetap terjaga.

Mengutip berita kompas.com oleh Advertorial (2016), bahwa meski dinilai banyak menghasilkan kemajuan, sampai sekarang pun penerapan otonomi daerah tidak semuanya berjalan dengan lancar. Bahkan masih terdapat banyak hal yang perlu dibenahi. Salah satunya adalah mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam memanfaatkan sumber daya alam. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 tertulis “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Namun di sebagian daerah realitanya tidak demikian. Hal tersebut dilihat tidak selaras dengan kenyataan tolak ukur yang ada. Karena untuk dapat melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, salah satunya dapat diukur melalui kinerja keuangan daerah. Usaha pemerintah daerah dalam menggali sumber dana yang berasal dari potensi daerah yang dimiliki serta kemampuan mengelola dan memanfaatkan sumber dana yang ada tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Ronald dan Sarmiyatiningsih, 2010).

Kebutuhan pemerintah daerah demi mengoptimalkan pelayanan publik pada masing-masing wilayahnya, tentu tidak sama dan selalu berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Pemerintah daerah akan mengeluarkan dana berupa belanja

daerah untuk keperluan konsumsi demi terwujudnya pelayanan publik yang semakin meningkat. Permasalahan yang terjadi saat ini adalah pemerintah daerah cenderung lebih mengandalkan transfer/*grants* dari pusat setelah otonomi daerah diterapkan, dibandingkan dengan memaksimalkan PAD daerahnya masing-masing. Padahal, jika dilihat dalam keadaan normal, peningkatan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) tiap individu masyarakat akan turut mempengaruhi PAD. Hal tersebut tentunya dapat memberikan efek domino pada pengeluaran pemerintah daerah yang sewajarnya juga turut mengalami peningkatan.

Beda yang paling menonjol terutama pada sisi keuangan pemerintahan di Indonesia setelah diberlakukannya otonomi daerah ialah adanya dana transfer atau dana perimbangan yang dialokasikan oleh pemerintah pusat. Dana Alokasi Umum; yang selanjutnya disebut DAU, merupakan salah satu unsur dana transfer selain DAK dan DBH oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari APBN. Seperti yang diutarakan oleh Nordiawan, dkk. (2007), DAU dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Saat pusat mengalokasikan DAU dengan alokasi yang cukup besar, maka pemerintah daerah berusaha agar pada periode berikutnya DAU yang diperoleh tetap, tidak berkurang. Hal ini yang menjadikan kontribusi PAD yang setelah era otonomi daerah diterapkan yang diharap dapat meningkat, justru mengalami penurunan. Bertolak belakang dengan teori yang diutarakan oleh Wallace E (1993) dalam Lin dan Liu (2000), bahwa:

“According to the proponents of fiscal decentralization, such a shift of fiscal power and responsibility to lower level of government can increase

economic efficiency because governments at lower level have informational advantages over the central government concerning resource allocation.”

Dengan kata lain, otonomi daerah sewajarnya dapat meningkatkan efisiensi ekonomi karena memiliki pemahaman masing-masing mengenai alokasi sumber pendapatan yang berpotensi pada wilayahnya. Namun pada nyatanya, tetap saja kontribusi DAU sebagai transfer pemerintah pusat terhadap Belanja Daerah justru lebih besar dibandingkan pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah. Dengan arti lain, pemberian DAU yang seharusnya menjadi stimulus peningkatan kemandirian keuangan daerah, justru direspon berbeda oleh daerah. Daerah tidak menjadi lebih mandiri, malah semakin bergantung pada pemerintah pusat (Ndadari dan Adi, 2008). Namun tetap saja, apabila terdapat respon yang asimetris terkait dengan penerimaan maupun pengeluaran maka dapat diindikasikan terjadi ilusi fiskal (Shinta, 2009 dalam Pramuka, 2010)

Menurut Haryono (2007) dalam Fitri (2014), data empiris yang ada menunjukkan bahwa proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya dapat membiayai belanja Pemerintah Daerah paling tinggi sebesar 20 persen. Hal ini juga menjadi salah satu alasan yang dijadikan Pemerintah Daerah seakan melakukan penghematan terhadap PAD, serta lebih mengandalkan transfer/*grants* dari pusat.

Realisasi PAD pada Kabupaten/kota di Indonesia, jumlah dan peningkatan kontribusi PAD, serta pertumbuhan PAD memiliki peranan dalam rencana peningkatan kemampuan daerah dari segi keuangan agar tidak selalu bergantung pada pemerintah pusat sehingga dapat menerapkan kemandirian di dalamnya. Karena PAD merupakan representasi pendapatan yang dihasilkan pada masing-masing daerah tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian replikasi dari penelitian milik Dinata (2013). Perbedaan penelitian terletak pada populasi dan sampel serta perbedaan periode tahun yang digunakan dalam penelitian. Dinata (2013) dalam penelitiannya menggunakan data kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat 5 tahun sebelum dan 11 tahun sesudah otonomi daerah, sedangkan peneliti menggunakan data yang lebih *general* yaitu kabupaten/kota di Indonesia sebagai populasi dan sampel penelitian serta menggunakan data 3 tahun sebelum dan 3 tahun sesudah otonomi daerah diberlakukan sebagai periode tahun yang digunakan. Dinata (2013) pula menggunakan tahun 2001 sampai dengan tahun 2011, sedangkan peneliti menggunakan jeda 10 tahun; sehingga data yang diambil yaitu dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, sebagai periode tahun penelitian sesudah diberlakukannya otonomi daerah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini mengangkat judul **“Analisis Perbedaan Kontribusi PAD terhadap Belanja Daerah serta Pertumbuhan PAD Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Indonesia)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka diidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja daerah sesudah otonomi daerah mengalami peningkatan dibandingkan dengan sebelum otonomi daerah?

2. Apakah pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesudah otonomi daerah mengalami peningkatan dibandingkan dengan sebelum otonomi daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan adapun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah kontribusi PAD terhadap belanja daerah sesudah otonomi daerah mengalami peningkatan dibandingkan dengan sebelum otonomi daerah?
2. Untuk mengetahui apakah pertumbuhan PAD sesudah otonomi daerah mengalami peningkatan dibandingkan dengan sebelum otonomi daerah?

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu dan informasi baru mengenai akuntansi khususnya dalam ranah sektor publik, juga diharapkan agar dapat membantu memberikan wawasan mengenai kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja daerah sebelum dan sesudah otonomi daerah serta pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum dan sesudah otonomi daerah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta gambaran bagi pemerintah daerah untuk kelak dapat menjadi bahan pertimbangan pengaruhnya suatu kebijakan setelah penerapannya sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Juga dapat dijadikan tolak ukur untuk dapat memaksimalkan kinerja serta potensi alami masing-masing daerah agar maksud dan tujuan dari dilaksanakannya otonomi daerah dapat terwujud secara optimal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Otonomi Daerah

Dalam UU No. 32 Tahun 2004, otonomi daerah dijelaskan sebagai hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dimana daerah otonom yang dimaksudkan adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ronald dan Sarmiyatiningsih, 2010).

Wewenang yang diberikan dalam pelaksanaan otonomi daerah terhadap kabupaten/kota didasari oleh desentralisasi yang bersifat nyata, luas, dan bertanggung jawab. Seperti yang tercantum di dalam UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 2 ayat 3, bahwa tujuan otonomi daerah ialah *menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang memang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,*

pelayanan umum, dan daya saing daerah. Dengan adanya maksud dari tujuan tersebut, diharapkan ada peningkatan *kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah* secara maksimal dari pemerintahan pada masing-masing daerah. Dengan terlaksananya hal tersebut, masyarakat diharapkan mampu merasakan secara langsung manfaat dari otonomi daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah seperti apa yang telah dijabarkan, dimaksudkan untuk dapat berfokus pada daerah atau kabupaten/kota sebagai sasaran utamanya. Seperti apa yang tertera dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai pendukung pelaksanaan otonomi daerah memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, potensi dan keanekaragaman daerah.
2. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.
3. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan kota, sedangkan untuk propinsi merupakan otonomi yang terbatas.
4. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara, sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah, serta antar daerah.
5. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom dan karenanya dalam daerah kabupaten dan daerah kota tidak ada bagi wilayah administrasi.

6. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik fungsi legislatif, fungsi pengawas maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintah daerah.
7. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah propinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administratif untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah.

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah

Menurut undang-undang No. 33 tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah atau yang selanjutnya disebut PAD; secara mendasar merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut Mardiasmo (2002), PAD adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Seperti yang dinyatakan oleh McCluskey dan Bevc (2007) bahwa:

“In addition, financial resources should be commensurate with the responsibilities allocated to them, and that part of the financial resources of local government should be derived from local taxes for which they have the power to determine the rate.”

Namun tidak hanya pajak daerah sumber yang menjadi asal terkumpulnya dana PAD, melainkan ada beberapa objek yang ikut membangun PAD. Menurut undang-undang No.33 tahun 2004 pasal 6, sumber-sumber PAD terdiri dari:

1. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah-daerah retribusi daerah.

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN.
- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta/kelompok.

4. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Rekening ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang disebut diatas. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan sebagai berikut :

- a. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
- e. Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang dan jasa oleh daerah
- f. penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- h. Pendapatan denda pajak
- i. Pendapatan denda retribusi
- j. Pendapatan eksekusi atas jaminan
- k. Pendapatan dari pengembalian
- l. Fasilitas sosial dan umum
- m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
- n. Pendapatan dari anggaran/cicilan penjualan.

2.1.3 Belanja Daerah

Belanja daerah dalam pengertian yang mendasar merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran (Halim, 2002). Serta dijelaskan pula dalam Undang-Undang No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Dari beberapa pengertian tersebut dapat kita asumsikan bahwa belanja daerah merupakan suatu kas yang

dikeluarkan pemerintah untuk memenuhi hak serta melaksanakan kewajiban pemerintah terhadap rakyat maupun pemerintah pusat.

Sesuai UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemda Pasal 155, belanja daerah dilaksanakan untuk mendanai urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, sedangkan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah didanai dari dan atas beban APBN. Menurut Nordiawan, dkk. (2007), Belanja daerah dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung.

1. Belanja Tidak Langsung

Merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung ini terdiri dari:

- a. Belanja pegawai,
- b. Bunga,
- c. Subsidi,
- d. Hibah,
- e. Bantuan sosial,
- f. Belanja,
- g. Bagi Hasil,
- h. Bantuan Keuangan, dan
- i. Belanja tidak terduga.

2. Belanja Langsung

Merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaab program dan kegiatan. Belanja langsung dari suatu kegiatan terdiri atas:

- a. Belanja pegawai (honorium/upah),
- b. Belanja barang dan jasa, serta
- c. Belanja modal.

Untuk kepentingan administratif, pengawasan, dan evaluasi, struktur APBD diklasifikasikan menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Urusan pemerintah terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, ada 25 (dua puluh lima) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan pemerintah daerah.

Klasifikasi belanja menurut urusan wajib mencakup pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, social, tenaga kerja, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, kebudayaan, pemuda dan olahraga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemerintahan umum, kepegawaian, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, arsip, serta komunikasi dan informatika. Sedangkan klasifikasi belanja menurut urusan pilihan mencakup pertanian, kehutanan, energy dan sumber daya mineral,

pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, serta transmigrasi (Nordiawan, dkk., 2007).

Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pada masing-masing pemda. Pembagian struktur belanja berdasarkan organisasi ini meliputi unsur pemerintahan daerah yang terdiri atas DPRD, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Selain klasifikasi belanja berdasarkan urusan pemerintah dan organisasi, belanja daerah juga dapat diklasifikasikan menurut fungsi, yang tujuannya adalah untuk keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan Negara (Nordiawan, dkk., 2007). Pengklasifikasian menurut fungsi ini terdiri atas:

- a. Pelayanan umum.
- b. Ketertiban dan ketentraman.
- c. Ekonomi.
- d. Lingkungan hidup.
- e. Perumahan dan fasilitas umum.
- f. Kesehatan.
- g. Pariwisata dan budaya.
- h. Pendidikan.
- i. Perlindungan sosial.

2.2 Penelitian Terdahulu

Ringkasan dari penelitian terdahulu disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Analisis Kinerja Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah di Kabupaten Kulon Progo	Andreas Ronald dan Dwi Sarmiyatiningsih (EFEKTIF Jurnal Bisnis dan Ekonomi, Vol. 1 No. 1, 2010)	1. Kinerja Keuangan 2. Pertumbuhan Ekonomi	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa sesudah diberlakukannya Otonomi Daerah, rasio efisiensi belanja cenderung menurun, yang artinya Belanja Daerah cenderung efisien sehingga pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan meskipun dalam angka yang relatif kecil.
2.	Analisis Kontribusi PAD terhadap Belanja Daerah dan Pertumbuhan PAD Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat)	Gita Dinata (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang, 2013)	1. Kontribusi PAD terhadap Belanja Daerah 2. Pertumbuhan PAD	1. Kontribusi PAD terhadap belanja daerah sebelum otonomi signifikan negatif terhadap kontribusi PAD terhadap belanja daerah sesudah otonomi daerah. 2. Pertumbuhan PAD sebelum otonomi signifikan positif terhadap pertumbuhan PAD sesudah otonomi daerah
3.	Perbedaan Pendapatan Asli Daerah Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi Bali	Gde Adi Pradnyana dan Ni Made Adi Erawati (E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol. 16 No. 3, 2016)	1. PAD	1. Hasil penelitian menunjukkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum otonomi Daerah berbeda dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesudah otonomi Daerah di

				<p>seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Bali.</p> <p>2. PAD di Kabupaten dan Kota di Provinsi Bali mengalami peningkatan.</p>
4.	<p>Peta Kemampuan Keuangan Daerah Sesudah Otonomi Daerah: Apakah Mengalami Pergeseran? (Studi Pada Kabupaten dan Kota se Jawa – Bali)</p>	<p>Wirawan Setiaji dan Priyo Hari Adi (Simposium Nasional Akuntansi X, Universitas Hassanudin Makassar, 26-28 Juli 2007)</p>	<p>3. Kemampuan Keuangan Daerah</p>	<p>1. Pada peta kemampuan keuangan sebelum otonomi daerah dilaksanakan (1999-2000) persebaran daerah paling tinggi berada pada kuadran IV.</p> <p>2. Terdapat perbedaan <i>Growth</i> (pertumbuhan) PAD yang signifikan antara sebelum dan sesudah otonomi daerah, kontribusi PAD terhadap belanja justru lebih rendah dibanding kontribusi setelah otonomi.</p> <p>3. Pada peta kemampuan keuangan setelah otonomi daerah dilaksanakan (2001-2004) dengan titik tengah rata-rata tahun 1999-2000, sebagian besar daerah berada pada kuadran II.</p>
5.	<p><i>Fiscal Decentralization and Economic Growth in China</i></p>	<p><i>Justin Yifu Lin and Zhiqiang Liu (Economic Development and Cultural Change, Vol. 49, page 1–21, 2000)</i></p>	<p>1. <i>Fiscal Decentralization</i> 2. <i>Economic Growth</i></p>	<p>1. Penelitian ini menemukan bahwa desentralisasi fiskal memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.</p> <p>2. Selain dari sektor desentralisasi fiskal, hal lain (sistem <i>household responsibility</i> pada rural sektor dan “kepentingan pribadi” sektor industri dengan memperluas kepemilikan publik</p>

				<p>perusahaan) juga menjadikan pertumbuhan ekonomi di China lebih kondusif.</p> <p>3. Menurut data yang terkumpul, desentralisasi fiskal telah meningkatkan rata-rata pertumbuhan di China terutama dengan mengembangkan efisiensi alokasi sumber daya daripada meningkatkan investasinya.</p>
6.	<i>Fiscal Decentralization in The Republic of Slovenia: An Opportunity for The Property Tax</i>	<i>William J. McCluskey and Igor Bevc (Property Management, Vol. 25 Issue: 4, pp.400-41, 2007)</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Fiscal Desentralizati on</i> 2. <i>Property Tax</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>This study finds that in terms of both municipal revenue and expenditure there remains a high degree of centralised control by the state.</i> 2. <i>On the positive side with the introduction of the new property tax there is an expectation for greater local fiscal autonomy, however, on the negative side progress towards the introduction of the new tax has been extremely slow.</i> 3. <i>The study concludes that while the proposals are likely to provide for a more stable and uniform local tax, there appears to be lethargy in implementing the property tax.</i>
7.	<i>Fiscal Externalities in A Three-Tier Structure of</i>	<i>Andreas Kappeler (Journal of Economic</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Conditional grants</i> 2. <i>Federal redistribution</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>The author identifies an additional qualitative incentive effect, particularly for</i>

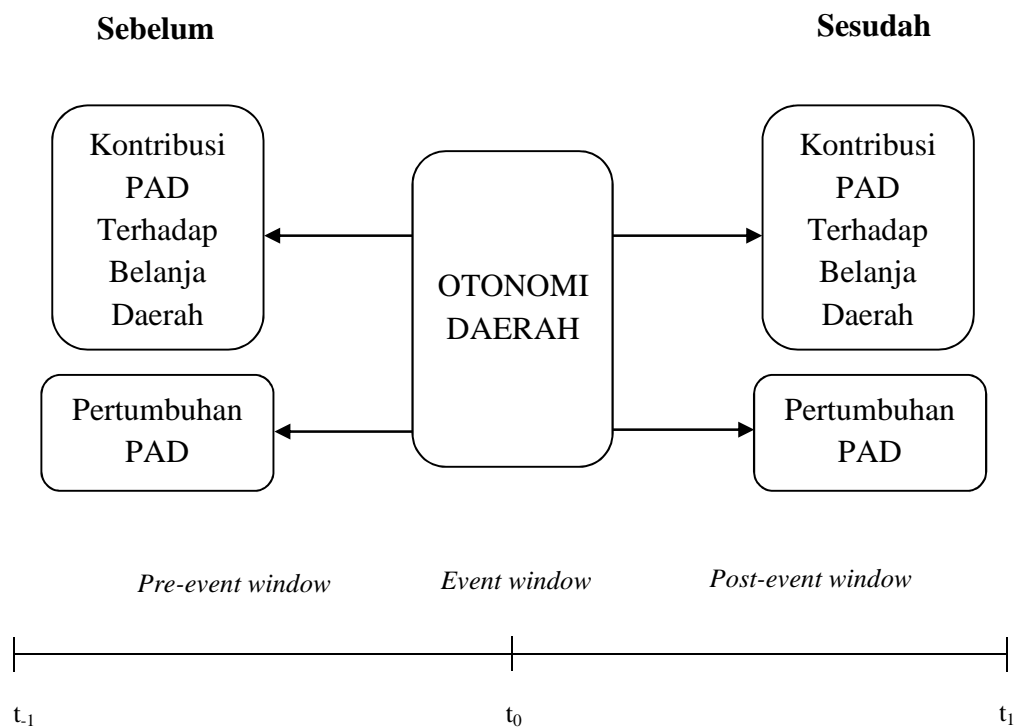
	<i>Government</i>	<i>Studies, Vol. 41 Issue: 6, pp.863-880, 2014)</i>	<ul style="list-style-type: none"> 3. <i>Public investment</i> 4. <i>Fiscal federalism</i> 	<p><i>intermediate governments. They behave strategically to attract additional redistribution funds from outside, though still using corrective policies to provide investment incentives toward their own regions.</i></p> <p><i>2. The results also suggest that differently from the USA the federal system of the EU may lead to inefficiently low regional investment.</i></p>
8.	<i>How Much Does Innovation Matter for Economic Growth?</i>	<i>Alberto Colino, Diana Benito-Osorio, Carlos Rueda Armengot (Management Decision, Vol. 52 Issue: 2, pp.313-325, 2014)</i>	<ul style="list-style-type: none"> 1. <i>Innovation</i> 2. <i>Economic Growth</i> 3. <i>Total Factor Productivity</i> 	<p><i>4. It seems that for the last five decades, growth in apparent labour productivity in the Southern European economies is mainly due to the evolution of TFP associated principally with innovation and technical progress.</i></p> <p><i>5. the growth accounting exercise reveals the importance of transitional dynamics in explaining the evolutionary path followed by these economies.</i></p> <p><i>6. an endogenous growth theory implication is that economic policies that embrace competition, technological process, openness, and innovation will promote growth.</i></p>

2.3 Model Penelitian

Penelitian ini akan mengamati apakah ada perbedaan kontribusi PAD terhadap belanja daerah serta pertumbuhan PAD sebelum dan sesudah diberlakukannya otonomi daerah. Kerangka penelitian digambarkan pada gambar 2.1 sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Penelitian



Keterangan:

t_0 = *event date* yaitu saat diberlakukannya kebijakan, tahun 2001.

t_{-1} = periode sebelum kebijakan, yaitu tahun 1998 s.d tahun 2000.

t_1 = periode sesudah kebijakan, yaitu tahun 2012 s.d. tahun 2014.

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Kontribusi PAD terhadap Belanja Daerah Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah

Seperti yang diuraikan oleh Adi (2006), otonomi daerah juga termasuk didalamnya desentralisasi fiskal yang mengharuskan daerah mempunyai kemandirian keuangan yang tinggi. Desentralisasi fiskal dilakukan pada saat daerah mempunyai tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Kebijakan otonomi daerah membawa perubahan yang sangat mendasar dalam peningkatan PAD. Dengan adanya otonomi daerah, berbagai daerah berlomba untuk melakukan inovasi demi terciptanya daerah yang mandiri, hal itu bisa dilihat dari pertumbuhan PAD yang semakin meningkat dan semakin besarnya kontribusi PAD tersebut terhadap belanja daerah (Dinata, 2013).

Hasil penelitian ini selaras dengan apa yang dihasilkan dari oleh Wirawan dan Priyo (2007), yang mengemukakan bahwa kontribusi PAD terhadap belanja daerah sesudah otonomi daerah lebih rendah dibandingkan dengan sebelum otonomi daerah diberlakukan. Hal tersebut pula sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dinata (2013), yang mengemukakan bahwa kontribusi PAD sesudah otonomi daerah lebih rendah daripada sebelum otonomi daerah.

Beberapa penelitian terdahulu memberikan hasil yang tidak sesuai dengan teori yang ada. Seperti apa yang dinyatakan oleh Dinata (2013) bahwa dengan adanya otonomi daerah, berbagai daerah berlomba untuk melakukan inovasi demi terciptanya daerah yang mandiri, hal itu bisa dilihat dari pertumbuhan PAD yang

semakin meningkat dan semakin besarnya kontribusi PAD tersebut terhadap belanja daerah. Namun tetap saja, diberlakukannya otonomi daerah memiliki maksud dan tujuan agar daerah dapat lebih mandiri, dapat mengatur daerahnya tanpa terlalu mengandalkan transfer/grants pemerintah pusat. Serta diharapkan dengan adanya kewenangan yang lebih besar memberikan peluang kepada daerah menggali berbagai potensi daerah dan mengoptimalkan berbagai sumber daya yang dimiliki, dan pada gilirannya dapat mendorong tercapainya kemampuan keuangan yang lebih baik (Setiaji dan Adi, 2007). Dari pernyataan tersebut, maka hipotesis yang diajukan berupa:

H_1 : *Kontribusi PAD terhadap belanja daerah sesudah otonomi daerah lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum otonomi daerah.*

2.4.2 Pertumbuhan PAD Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah

Pradnyana dan Erawati (2016) menyatakan bahwa sejak diberlakukannya otonomi, pemerintah daerah dalam era otonomi mulai menggali potensi-potensi pendapatan asli dari daerahnya sehingga PAD dapat meningkat cukup tinggi. Di sisi lain, pemerintah daerah juga diharapkan menjadi lebih mandiri dengan mengurangi ketergantungan terhadap subsidi yang diturunkan dari pusat. Keterkaitan antara desentralisasi dan penerimaan asli daerah (PAD) yang paling realistis adalah bahwa desentralisasi memungkinkan pemberdayaan sosial, memberikan keleluasaan kepada daerah untuk beradaptasi dengan perkembangan sosial ekonomi yang cepat di tingkat lokal sehingga memungkinkan untuk menggali potensi PAD secara maksimal (Dinata, 2013). Dengan maksud dan

tujuan tersebut, maka pemberlakuan otonomi daerah diharapkan mampu membuat pertumbuhan PAD menjadi lebih baik.

Hasil penelitian milik Setiaji dan Adi (2007), Dinata (2013), serta Pradnyana dan Erawati (2016), memiliki hasil selaras yang mengemukakan bahwa pertumbuhan PAD setelah otonomi secara empiris lebih tinggi (lebih baik) dibanding pertumbuhan PAD sebelum otonomi. Begitu juga dengan hasil penelitian oleh Lin dan Liu (2000), yang menunjukkan hasil bahwa desentralisasi fiskal memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil dari penelitian-penelitian tersebut juga sejalan dengan hasil penelitian dari Colino *et al.* (2014) yang menyatakan bahwa:

“An endogenous growth theory implication is that economic policies that embrace competition, technological process, openness, and innovation will promote growth.”

Bahwa dengan adanya kompetisi, proses peningkatan teknologi, keterbukaan, serta dengan adanya inovasi tentu akan berpengaruh baik pada pertumbuhan ekonomi. Otonomi daerah merupakan salah satu inovasi yang diberlakukan agar pemerintah daerah dapat lebih efisien dalam menggali potensi-potensi pendapatan asli dari daerahnya sehingga pertumbuhan PAD untuk masing-masing daerah dapat tumbuh dengan lebih baik. Dari teori dan hipotesis tersebut, diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : *Pertumbuhan PAD sesudah otonomi daerah lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum otonomi daerah.*

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi merupakan suatu wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010). Populasi yang digunakan di dalam penelitian ini merupakan Kabupaten/Kota yang terdapat di Indonesia.

Metode *sampling* yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan teknik *cluster sampling* dan *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2010), *cluster sampling* merupakan salah satu metode pengambilan sampel dengan teknik *probability sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel.

Dengan menggunakan *cluster sampling*, untuk menentukan mana yang dijadikan sampelnya, maka wilayah populasi terlebih dahulu ditetapkan secara random, dan menentukan jumlah sample yang digunakan pada masing-masing daerah tersebut dengan menggunakan teknik *proporsional stratified random sampling* mengingat

jumlahnya yang bisa saja berbeda (Sugiyono, 2010). Sedangkan untuk metode *purposive sampling*, kriteria yang digunakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kabupaten/Kota di Indonesia yang telah berdiri dan bukan merupakan daerah hasil pemekaran selama periode tahun penelitian.
2. Kabupaten/Kota tersebut memiliki Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dalam jangka waktu 3 tahun sebelum dan 3 tahun sesudah otonomi daerah, yaitu tahun 1998 - 2000 serta tahun 2012 - 2014.

3.2 Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yaitu berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia yang telah diaudit untuk tahun 1998 - 2000 dan tahun 2012 - 2014. Data tersebut diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah (www.djpk.depkeu.go.id).

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan besaran kontribusi PAD terhadap belanja daerah serta pertumbuhan PAD sebelum dan sesudah diterapkannya otonomi daerah di seluruh Indonesia untuk periode penelitian, yaitu sebelum (tahun 1998 - 2000) dan sesudah (tahun 2012 - 2014) otonomi daerah.

3.3.1 Kontribusi PAD terhadap Belanja Daerah

Dijelaskan dalam Undang-Undang No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja dalam APBD secara umum dikelompokkan menjadi lima kelompok yaitu Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik, Belanja Modal, Belanja Transfer, serta Belanja Tak Tersangka. PAD menjadi salah satu komponen yang akan mempengaruhi besaran belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Berikut ialah rumus Perhitungan Kontribusi PAD terhadap belanja daerah:

$$K = \frac{X}{Y} \times 100\%$$

Keterangan:

- K : Kontribusi PAD (%)
X : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Y : Total Belanja Daerah

3.3.2 Pertumbuhan PAD

Menurut undang-undang No. 33 tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara mendasar merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber didalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut

Mardiasmo (2002), PAD adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah.

PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain yang termasuk dalam pendapatan yang sah.

Pertumbuhan PAD berbeda-beda setiap tahunnya. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yang mendukung. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, diharapkan pertumbuhan PAD sesudahnya dapat lebih baik serta meningkat. Berikut ini merupakan rumus Perhitungan Pertumbuhan PAD:

$$P = \frac{X_i - (X_{i-1})}{(X_{i-1})} \times 100\%$$

Keterangan:

P : Pertumbuhan PAD (%)

X_i : Pendapatan Asli Daerah (PAD) periode i

X_{i-1} : Pendapatan Asli Daerah (PAD) periode i-1

3.4 Metode Analisis Data

3.4.1 Statistik Deskriptif

Seperti apa yang disebutkan oleh Sugiyono (2014), metode statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau

generalisasi. Selain itu pula, statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai minimum (*min*), nilai maksimum (*max*), nilai rata-rata (*mean*), dan standar deviasi mengenai variabel independen dan dependen yang di jabarkan dalam bentuk statistik (Ghozali, 2013).

3.4.2 Uji Normalitas

Uji normalitas data menjadi langkah awal yang harus dilakukan untuk setiap analisis *multivariate*. Apabila terdapat normalitas, maka residual akan terdistribusi secara normal dan independen (Ghozali, 2013). Dapat dikatakan bahwa uji normalitas secara umum dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah sampel yang diselidiki terdistribusi secara normal atau tidak.

Dalam Ghozali (2013), dijelaskan pula mengenai dasar pengambilan untuk uji normalitas data sebagai berikut:

1. Jika data menyebar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

3.4.3 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*) versi 22.0. Hubungan yang akan diujikan dalam penelitian ini

yaitu mengenai kontribusi PAD terhadap belanja daerah serta pertumbuhan PAD sebelum dan sesudah otonomi daerah.

Untuk menguji dua sampel data yang berpasangan digunakan Uji *Paired Sample T-test*. Uji ini menggunakan sampel data yang sama, namun perlakuan yang diberikan berbeda, yaitu dengan membandingkan dua sampel data sebelum diberi perlakuan (*pre-test*) dan setelah diberi perlakuan (*post-test*). Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan menggunakan tingkat keyakinan sebesar 95% dan tingkat *analysis error* () sebesar 5%. Dan apabila digambarkan kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

1. Jika *Asymp. Sig.* > 0,05 maka H_0 tidak terdukung dan H_a terdukung.
2. Jika *Asymp. Sig.* < 0,05 maka H_0 terdukung dan H_a tidak terdukung.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji apakah terdapat perbedaan kontribusi PAD terhadap belanja daerah serta pertumbuhan PAD sebelum dan sesudah otonomi daerah pada kabupaten/kota di Indonesia. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa hanya hipotesis kedua yaitu pertumbuhan PAD yang terdukung. Namun untuk hipotesis pertama yaitu kontribusi PAD terhadap belanja daerah terbukti tidak terdukung. Adapun simpulan analisis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hipotesis pertama, hasil menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap belanja daerah sesudah otonomi daerah secara signifikan lebih rendah dibandingkan dengan sebelum diberlakukannya otonomi daerah. Penurunan kontribusi PAD disebabkan karena setelah otonomi daerah berlangsung, pemerintah daerah cenderung berhemat dalam penggunaan PADnya serta lebih mengandalkan DAU yang diterima dari pemerintah pusat (*flypaper effect*).
2. Berdasarkan hipotesis kedua, hasil menunjukkan bahwa pertumbuhan PAD sesudah otonomi daerah secara signifikan lebih tinggi dibandingkan

dengan sebelum diberlakukannya otonomi daerah. Diberlangsungkannya otonomi daerah memberikan dampak yang cukup membuat pemerintah daerah bereaksi dengan lebih berinovasi serta lebih efisien dalam pengelolaan PAD daerahnya.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan selama penelitian ini diselesaikan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya melakukan analisis pada dua variabel saja, yaitu kontribusi PAD terhadap belanja daerah dan pertumbuhan PAD sebelum dan sesudah diberlakukannya otonomi daerah. Sehingga menjadikan penelitian ini masih belum dapat menghasilkan informasi dampak diberlangsungkannya otonomi daerah dalam banyak cakupan bidang, khususnya bidang ekonomi di Indonesia.
2. Penelitian ini hanya melakukan analisis pada 3 tahun sebelum dan 3 tahun sesudah otonomi daerah dilakukan. Yaitu tahun 1998 – 2000 dan tahun 2012 – 2014. Belum dapat mengambil periode tahun yang lebih panjang karena kesediaan data yang belum lengkap.
3. Meskipun populasi dan sampel penelitian ini tergolong lebih *general* dari penelitian-penelitian sebelumnya, namun masih banyak data PAD dan belanja daerah pada beberapa kabupaten/kota yang tidak tercantum pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang digunakan. Sehingga beberapa kabupaten/kota yang bersangkutan tidak dapat diambil menjadi sampel.

5.3 Saran

Pada penelitian selanjutnya agar dapat memperhatikan beberapa hal, sebagai berikut:

1. Disarankan untuk penelitian selanjutnya untuk dapat menganalisis tidak hanya perubahan kontribusi PAD terhadap belanja daerah serta pertumbuhan PAD saja untuk periode sebelum dan sesudah diberlakukannya otonomi daerah. Seperti contoh, dapat menambahkan variabel pertumbuhan ekonomi dan atau pengaruhnya dengan kinerja pemerintah daerah. Sehingga hasil serta informasi yang diperoleh dapat menunjukkan dampak dan pengaruh diberlakukannya otonomi daerah secara lebih luas lagi.
2. Disarankan untuk penelitian selanjutnya agar dapat menambah periode tahun penelitian, tidak hanya 3 tahun sebelum dan sesudah diberlakukannya otonomi daerah. Sehingga hasil analisis yang didapat akan lebih akurat.
3. Untuk penelitian selanjutnya disarankan agar dapat memperoleh populasi data (dalam penelitian ini berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA)) kabupaten/kota yang mengandung informasi data yang lebih lengkap. Sehingga tidak banyak sampel yang terbuang sia-sia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Priyo Hari. 2006. Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali). *Simposium Nasional Akuntansi IX*. Padang.
- Afrizawati. 2012. Analisis *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi dan Akuntansi (JENIUS)*. Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang.
- Agus Pramuka, Bambang. 2010. *Flypaper Effect* pada Pengeluaran Pemerintah Daerah Jawa. *Jurnal Ekonomi Pembangunan, Volume 11*. Fakultas Ekonomi Universitas Jendral Soedirman.
- Amalia, Fitri. 2015. Analisis *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten. *Jurnal Organisasi dan Manajemen, Volume 11*. UIN Syarif Abdullah Jakarta.
- Atmosoeparto, Kisdarto, 2002. *Menuju SDM Berdaya – Dengan Kepemimpinan Efektif dan Manajemen Efisien*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Colino, Albert, Diana Benito-Osorio, Carlos Rueda Armengot. 2014. *How Much does Innovation Matter For Economic Growth?. Management Decision, Vol. 52 Issue: 2, pp.313-325.*
- Dinata, Gita. 2013. Analisis Kontribusi PAD terhadap Belanja Daerah dan Pertumbuhan PAD Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Fitri, Diana. 2014. Pengaruh Belanja Pegawai Dan Belanja Modal Terhadap *Flypaper Effect*. *Jurnal Fakultas Ekonomi*. Universitas Negeri Padang. Padang.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 21*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.
- Kappeler, Andreas. 2014. *Fiscal Externalities In A Three-tier Structure Of Government*. *Journal of Economic Studies*. Vol. 41 Issue: 6, pp.863-880.
- Lin, Justin Yifu and Zhiqiang Liu. 2000. *Fiscal Decentralization and Economic Growth in China*. *Economic Development and Cultural Change*. Chicago. Vol. 49, Hal. 1-21.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- McCluskey, William J. Igor Bevc. 2007. *Fiscal Decentralization In The Republic Of Slovenia: An Opportunity For The Property Tax*. *Property Management*, Vol. 25 Issue: 4, pp.400-419.
- Ndadari, Laras Wulan dan Priyo Hari Adi. 2008. Perilaku Asimetris Pemerintah Daerah Terhadap Transfer Pemerintah Pusat. *The 2nd National Conference UKWMS*. 6 September 2008. Surabaya.
- Nordiawan, Deddi, Iswahyudi Sondi Putra, dan Maulidah Rahmawati. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat.
- Pradnyana, Gde Adi dan Ni Made Adi Erawati. 2016. Perbedaan Pendapatan Asli Daerah Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 16, No. 3, September 2016: 1885-1911.
- Ronald, Andreas dan Dwi Surmiyatiningsih. 2010. Analisis Kinerja Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi Sebelum Dan Sesudah Diberlakukannya Otonommi Daerah Di Kabupaten Kulon Progo. *EFEKTIF Jurnal Bisnis dan Ekonomi*. Vol. 1, No. 1, Juni 2010, 31-42.
- Setiaji, Wiryawan dan Priyo Hari Adi. 2007. Peta Kemampuan Keuangan Daerah sesudah Otonomi daerah: Apakah mengalami pergeseran?. *Simposium Nasional Akuntansi X*. Unhas Makassar. 26-27 Juli.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Penerbit CV Alfabeta. Bandung.
- _____. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Penerbit CV Alfabeta. Bandung.
- Undang - Undang No. 32 Tahun 2004. *Pemerintah Daerah*. Bandung, Kuraikum Pratama

_____ No. 33 Tahun 2004. *Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah*, Bandung, Kuraikum Pratama.

<http://nasional.kompas.com/read/2016/03/28/19060911/Sentilan.Ketua.MPR.untuk.Otonomi.Daerah> diakses pada 25-09-2016

<http://ilmupengetahuanumum.com/profil-daftar-kabupaten-dan-kota-di-provinsi-lampung>/diakses pada 27-09-2016

http://djpk.depkeu.go.id/?page_id=316/diakses pada 15-02-2017

http://djpk.depkeu.go.id/?page_id=321/diakses pada 15-02-2017